

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

**DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KOTA BOGOR**



PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Bogor Telp. (0251) 8321075 psw 287

BOGOR - 16121

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bidang Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik merupakan salah satu bidang yang mempunyai peran sangat strategis karena memiliki peran sebagai urat nadi perekonomian masyarakat, sehingga keberadaannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan seiring dengan tuntutan jaman dan kemajuan teknologi. Penanganan pada bidang Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik ditujukan untuk memperlancar proses distribusi barang dan jasa, pergerakan manusia dan ketersediaan sistem informasi dan pelayanan publik.

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada semua *stakeholder*.
- b. Meningkatkan Kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi.
- c. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*.
- d. Peningkatan mutu pelayanan publik
- e. Mewujudkan lingkungan masyarakat bogor yang cerdas, dinamis dan kompetitif dalam persaingan lokal dan global
- f. Mewujudkan jaringan komunikasi yang efektif dan efisien
- g. Mengoptimalkan penggunaan web dan memanfaatkan email sebagai media dalam sistem informasi
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika guna mencapai efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan peranan Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik tersebut, diatas maka eksistensinya perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pembangunan yang mengacu kepada konsep kesisteman. Untuk maksud tersebut diperlukan proses perencanaan yang tepat dengan tahapan yang terarah dengan menyusun program dan kegiatan berdasarkan Visi, Misi dan Strategi yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik. Diharapkan renja tersebut dapat dijadikan acuan bertindak sehingga setiap anggota organisasi pada Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik dapat bekerja berdasarkan target renja yang ada untuk dijadikan komitmen bersama.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam Renja SKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan perencanaan renja 2017 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik yang dijadikan acuan bagi setiap satuan unit kerja Dinas dalam menentukan alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai penunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) nya dalam menuntaskan isu rencana kerja.

Sedangkan tujuan penyusunan perencanaan kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2017.
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyusunan program dan kegiatan antar tingkat satuan unit kerja Dinas dalam mewujudkan visi dan misi, sehingga diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi atau disorientasi dari Core Businessnya.
3. Terpenuhinya lingkungan internal dan lingkungan eksternal (kebutuhan masyarakat) berupa terciptanya informasi publik yang handal yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang lebih realistis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014 – 2019 (RPJM).

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Metoda dalam penyusunan perencanaan kerja adalah mengkombinasikan antara metoda Top down dan Bottom up, meskipun disadari bahwa perencanaan ini merupakan tugas para pemimpin, namun dengan kombinasi yang bersifat partisipatif dan transparansi diharapkan hasil yang akan dicapai lebih bersifat representatif . Dengan demikian perencanaan stratejik merupakan kontrak sosial bagi seluruh pelaku organisasi pada Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik.

Sistematika Penulisan Renja SKPD berdasarkan Pedoman Penyusunan Renja yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor adalah :

Bab I	: PENDAHULUAN
1.1.	: Latar Belakang
1.2.	: Landasan Hukum
1.3.	: Maksud dan Tujuan
1.4.	: Sistematika Penyusunan
Bab II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1.	: Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD (Tabel 1)
2.2.	: Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.	: Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Bab III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.	: Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2.	: Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3.	: Program dan Kegiatan (Tabel 2)
Bab IV	: PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika serta persandian juga atastistik;
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang komunikasi dan informatika serta persandian juga atastistik;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas maka Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik membawahi :

1. Sub.Bagian Tata Usaha (Sekretariat)

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang umum, kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan yaitu :

1. Pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan OPD;
3. Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran;
4. Pengelolaan administrasi keuangan;
5. Pembinaan Satuan Pemegang Kas;
6. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup OPD;
7. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi;
8. Penyusunan laporan kegiatan Dinas.

2) Personel

Jumlah personel pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 12 adalah sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 6 Orang
- Tenaga Outsourcing : 6 Orang

3) Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor : 36 Tahun 2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Penjabaran APBD Tahun 2014 pada Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kota Bogor terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

a. Belanja Langsung

Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan belanja langsung meliputi menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Target pengelolaan administrasi keuangan belanja langsung Tahun 2017 sebesar **Rp. 11,561,000,000,-**

Adapun rincian dari Kegiatan Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN Kegiatan	ANGGARAN THN 2017 (Rp)
1	2	3
1.	Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga OPD	400,000,000
2.	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	50,000,000
3.	Kegiatan Pengadaan Inventaris Dinas	500,000,000
4.	Kegiatan pemeliharaan Inventaris Dinas	350,000,000
5.	Kegiatan Pengadaan BANDWIDTH.	2,500,000,000
6.	Kegiatan Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor	1,036,000,000
7.	Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota.	1,500,000,000
8.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Center	500,000,000
9.	Kegiatan Pembangunan Wifi Ruang Publik	200,000,000
10.	Kegiatan Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan	100,000,000
11.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e-Govt	800,000,000
12.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor	100,000,000
13.	Kegiatan Pengembangan dan Pembuatan repository / data Warehouse	100,000,000
14.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Contact Center dan Bogor Green Room	1,850,000,000
15.	Kegiatan Digitalisasi Profil.	100,000,000
16.	Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, II, III	100,000,000
17.	Penyelenggaraan siaran Streaming TV Sipatahunan	500,000,000
18.	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara.	300,000,000
19.	Kegiatan Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan	200,000,000
20.	Kegiatan Pembuatan Data Base Postel	125,000,000
21.	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD	250,000,000
	JUMLAH TOTAL	11,561,000,000

b. Belanja Tidak Langsung

Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan belanja tidak langsung untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lainnya sebesar **Rp. 6.954.813.896;**

c. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian

- a) Penyusunan DUK dan Nominatif Pegawai Tahun 2017;
- b) Menyiapkan dan membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Tahun 2017;
- c) Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2017;
- d) Menyiapkan SKUM PTK pegawai Tahun 2017;

d. Pelaksanaan Pengelolaan Kerumah Tanggaan

- a) Permohonan perlengkapan administrasi operasional Dinas;
- b) Pembuatan daftar inventaris Dinas;
- c) Pengadaan perlengkapan kebutuhan pegawai dan Dinas;
- d) Menyusun RKBU, RTBU dan Pengadaan barang lingkup Dinas.

e. Pelaksanaan pengevaluasian, monitoring, perencanaan dan pelaporan

- a). Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
- b). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- d). Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD), LKPJ – AMJ;
- e). Laporan Triwulan, Tahunan dan Rencana Kerja Dinas Kominfo;
- f). Mengkoordinir Penyusunan Renstra Dinas Kominfo dan Hasil Musrembang.

4) Rencana Kegiatan Tahun 2017 yang terdapat dalam Renstra Dinas Tahun 2014- 2019

1. Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 400,000,000;**
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Inventaris Dinas dengan anggaran sebesar **Rp. 350,000,000;**
3. Kegiatan Pengadaan Inventaris Dinas dengan anggaran sebesar **Rp. 400,000,000;**
4. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD dengan Anggaran sebesar **RP. 500.000.000;**

5) Kegiatan yang Terakomodir dalam DPA Tahun 2016

1. Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga SKPD

Anggaran DPA Tahun 2016 yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar **Rp. 423,000,000;**

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Dinas

Anggaran DPA Tahun 2016 yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar **Rp. 378.400,000;**

Kegiatan Pengadaan Inventaris Dinas

Anggaran DPA Tahun 2016 yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar **Rp. 1,178,400,000;**

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD

Anggaran DPA Tahun 2016 yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar **RP. 47.300.000;**

6) Capaian Program Kegiatan Tahun 2016

1. .Tata Usaha

1. Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga SKPD

Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD, Honor Pegawai Non PNS, ATK, Barang Cetak, Alat Listrik dan Elektronik, Peralatan Kebersihan, Biaya telepon, Biaya listrik, Surat Kabar, Mamin, Perjalanan Dinas, BBM, PDH) (bulan)

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Dinas

Inventaris Kantor yang Terpelihara

3. Kegiatan Pengadaan Inventaris Dinas

Inventaris Kantor yang Terpelihara

4. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD

Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renja OPD) dan Laporan Akuntabilitas (LAKIP, LKP, LPPD secara tepat waktu (%))

5. Kegiatan E-Government

OPD yang menyediakan informasi publik sesuai undang-undang tentang keterbukaan informasi public

Jumlah regulasi tentang implementasi teknologi informasi dan komunikasi (Perwali)

2. Seksi Sarana Komunikasi & Informatika

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi di Seksi jaringan dan fungsi Seksi Jaringan yaitu :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis jaringan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan jaringan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan jaringan.

2) Personel

Jumlah personel pada Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika sebanyak 12 adalah sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 5 Orang
- Tenaga Outsourcing : 7 Orang

3) Rencana Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

- a) Memfasilitasi jaringan internet, internet dan komunikasi di Wilayah Kota Bogor dalam peningkatan kinerja penerimaan dan layanan masyarakat;
- b) Melaksanakan pengaturan sistem, perbaikan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengembangan jaringan internal dan eksternal dan jaringan komunikasi di Wilayah Kota Bogor;
- c) Melaksanakan rekomendasi yang meliputi rekomendasi permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline, rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi dan rekomendasi izin instalansi penangkal petir dan genset.

4) Rencana Kegiatan Tahun 2016 yang terdapat dalam Renstra Dinas 2014 - 2019

1. Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Intranet dan Internet (backbone) Kota Bogor dengan anggaran sebesar **Rp. 1.500.000.000;**
2. Kegiatan Pengadaan Alat alat Fiber Optik dan Jaringan Wireless.
3. Kegiatan Pemeliharaan jaringan intranet dan internet, NOC dan Penataan jaringan intranet dan internet Kota Bogor

5) Kegiatan yang Terakomodir dalam DPA Tahun 2016

1. Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Intranet dan Internet (backbone) Kota Bogor

Anggaran DPA yang telah disediakan untuk kegiatan tersebut di atas sebesar **Rp. 1,036,000,000;**

2. Kegiatan Pengadaan Bandwith 200 Mbps untuk melayani 18 Bts, SKPD dan Kelurahan Se-Kota Bogor

Anggaran DPA yang telah disediakan untuk kegiatan tersebut diatas sebesar **Rp. 2,500,000,000;**

6) Capaian Program Kegiatan Tahun 2015

1. Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Intranet dan Internet (backbone) Kota Bogor

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah

2. Kegiatan Pembayaran Biaya Bandwith

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3. Seksi Aplikasi Telematika dan Pengelolaan Data Elektronik

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Seksi Aplikasi Telematika dan Pengolahan Data Elektronik (PDE) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang komunikasi dan informatika di bidang Aplikasi Telematika dan Pengolahan Data Elektronik.

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang aplikasi telematika dan pengolahan data elektronik;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan aplikasi telematika dan pengolahan data elektronik;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan aplikasi telematika dan pengolahan data elektronik.

2) Personel

Jumlah personel pada Seksi Aplikasi Telematika dan Pengolahan Data Elektronik sebanyak 19 adalah sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 4 Orang
- Tenaga Outsourcing : 15 Orang

3) Rencana Pelaksanaan Tugas Tahun 2017

- a) Melaksanakan rancang bangun sistem informasi manajemen daerah melalui sistem informasi;
- b) Melaksanakan pemeliharaan hardware dan software;
- c) Menyiapkan standar, prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, lunak dan jaringan komunikasi dalam kerangka e-Government;
- d) Memfasilitasi rancang bangun aplikasi, pengadaan dan perbaikan komputer unit kerja;
- e) Menyediakan informasi berbasis IT untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4) Rencana Kegiatan Tahun 2017 yang terdapat dalam Renstra Dinas Tahun 2014 - 2019

1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e-Govt dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000;
2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000;
3. Kegiatan Pengembangan dan Pembuatan repository / data Warehouse dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000;
4. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Contact Center dan Bogor Green Room dengan anggaran sebesar Rp,1.850.000.000,-
5. Kegiatan Digitalisasi Profil. dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,-
6. Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, II, III dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

5) Kegiatan yang Terakomodir dalam DPA Tahun 2016

1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e-Govt dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000;
2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor dengan anggaran sebesar Rp. 141.900.000;
3. Kegiatan Pengembangan dan Pembuatan repository / data Warehouse dengan anggaran sebesar Rp. 189.200.000;
4. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Contact Center dan Bogor Green Room dengan anggaran sebesar Rp,2.223.411.100,-
5. Kegiatan Digitalisasi Profil. dengan anggaran sebesar Rp 353.804.000,-
6. Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, II, III dengan anggaran sebesar Rp 251.200.000,-

6) Capaian Program Kegiatan Tahun 2014

- 1. Kegiatan Pemeliharaan CCTV Analog dan Peralatan Multimedia**
Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah
- 2. Kegiatan Penyediaan Perangkat Komputer Lab RICE Kota Bogor**
Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah
- 3. Kegiatan Co location Server Hosting, Redelove Website**
Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah

4. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik

Seksi Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai fungsi bidang Komunikasi dan Informatika di bidang Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik.

1) Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di Wilayah Kota Bogor yang meliputi Jasa Titipan, Wartel, Warnet dan Warsel;
- b. Melaksanakan pemrosesan perizinan lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan televisi;

- c. Melakukan rekomendasi teknis izin yang meliputi :
- Rekomendasi teknis izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
 - Rekomendasi teknis izin galian untuk keperluan jaringan telekomunikasi;
 - Rekomendasi teknis izin Dinas cabang dan loket pelayanan operator;
 - Rekomendasi izin jasa titipan Dinas agen;
- d. Izin Operasional Menara (IOM) telekomunikasi.

2) **Personel**

Jumlah personel pada Seksi Pengelolaan Komunikasi dan Informatika sebanyak 15 Orang adalah sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 8 Orang
- Tenaga Outsourcing : 7 orang

3) **Rencana Pelaksanaan Tugas Tahun 2016**

- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di Wilayah Kota Bogor yang meliputi Jasa titipan, Wartel, Warnet dan Warsel;
- b. Melakukan rekomendasi teknis izin yang meliputi :
- Rekomendasi teknis izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
 - Rekomendasi teknis izin galian untuk keperluan jaringan telekomunikasi;
 - Rekomendasi teknis izin Dinas cabang dan loket pelayanan operator;
 - Rekomendasi izin jasa titipan Dinas agen;
 - Izin Operasional Menara (IOM) telekomunikasi.
 - Pendataan Menara Telekomunikasi

4) **Rencana Kegiatan Tahun 2016 yang terdapat dalam Renstra Dinas Tahun 2014 - 2019**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Radio Sipatahunan dengan anggaran sebesar **Rp. 400.000.000;**
2. Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan anggaran sebesar **Rp. 250.000.000;**
3. Kegiatan pengendalian peredaran Film, VCD dan DVD dengan anggaran sebesar **Rp.100.000.000;**

5) **Kegiatan yang Terakomodir dalam DPA Tahun 2016**

1. **Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Radio Sipatahunan**
Anggaran DPA yang telah disediakan untuk kegiatan tersebut di atas sebesar **Rp. 700.000.000;**
2. **Kegiatan Pengendalian Menara Telekomunikasi**
Anggaran DPA yang telah disediakan untuk kegiatan tersebut di atas sebesar **Rp. 250.000.000;**
3. **Kegiatan Pengendalian peredaran Film, VCD dan DVD**
Anggaran DPA yang telah disediakan untuk kegiatan tersebut di atas sebesar **Rp. 100.000.000;**

6) **Capaian Program Kegiatan Tahun 2017**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Radio Sipatahunan

Meningkatnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sipatahunan

2. Kegiatan Pengendalian Menara Telekomunikasi

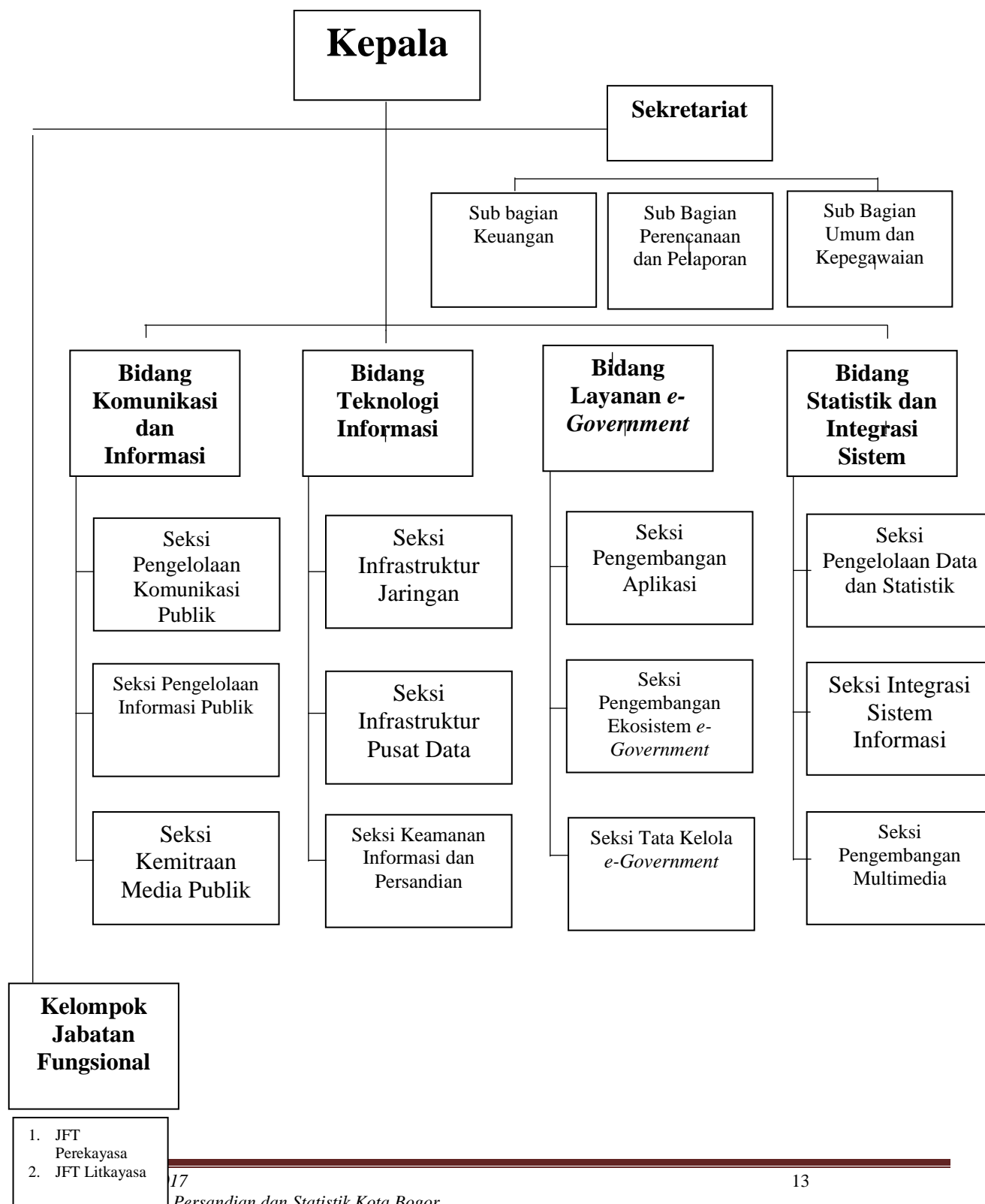
Meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi menara telekomunikasi

3. Kegiatan Pengendalian peredaran Film, VCD dan DVD

Terkendalinya peredaran Film, VCD dan DVD di Kota Bogor.

2.2 ANALISIS / GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. BAGAN ORGANISASI DINAS KOMINFO, PERSANSDIAN DAN STATISTIK



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

FUNGSI

Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tersebut meliputi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kominfo terdiri dari:

1. Pejabat Eselon III (Kepala Dinas, Kepala Sub.Bagian Tata Usaha).
2. Pejabat Eselon IV (Kepala Seksi).

C. KONDISI ORGANISASI.

Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik saat ini telah melaksanakan kegiatan sebagian urusan dibidang Komunikasi antara lain :

1. Kegiatan Pengadaan Bandwidth 220 Mbps untuk melayani 18 BTS, SKPD dan Kelurahan.
2. Kegiatan Penyediaan Perangkat Komputer Lab RICE Kota Bogor
3. Kegiatan Pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Internet dan Internet (Backbone) Kota Bogor
4. Kegiatan Pemeliharaan Sistem CCTV Analog dan Peralatan Multimedia
5. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sipatahunan.

2.3 ISU-ISU STRATEGIS

A. BIDANG KOMUNIKASI

1. Masalah Komunikasi di Kota Bogor timbul sebagai akibat keterbatasan sistem prasarana jaringan Internet dan Intranet yang belum maksimal.
2. Tingginya Curah Hujan masih menjadi masalah penting di Kota Bogor. Pada Saat musim hujan sering sekali perangkat terkena petir.
3. Ketidak stabilan koneksi internet karena masih menggunakan wirelles

B. PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS

Perubahan-perubahan yang terjadi selalu menjadi perhatian bagi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kota Bogor sebagai antisipasi terhadap penyusunan kebijakan. Faktor-faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal merupakan masukan signifikan bagi perencanaan ke depan yang sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai kondisi pelayanan ideal yang diharapkan.

1. Analisis Lingkungan Internal

- a. Dukungan political will dari pemerintah daerah dalam pengembangan sistem Informasi Publik di Kota Bogor.

Dengan berakhirnya Rencana Strategis Kota Bogor periode 2009-2014 dan sejalan dengan berlanjutnya kepemimpinan Tingkat Kota untuk 5 tahun yang akan datang (periode 2014-2019) dengan Bima Arya sebagai Walikota Bogor dan Usmar Hariman sebagai Wakil Walikota Bogor belum membuat perencanaan dalam perubahan dengan penataan Tower di Kota Bogor karena baru dilantik bulan April 2014 .

- b. Kelembagaan

Kelembagaan pada instansi hanyalah suatu alat untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut didirikan, dan dengan adanya kebijakan tertentu dapat mengakibatkan tujuan lembaga berubah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan terhadap kebijakan tersebut. Guna mencari bentuk lembaga yang sangat ideal hingga saat ini masih belum ditemukan sehingga menjadi hal yang wajar apabila bentuk, nama dan struktur lembaga selalu mengalami perubahan. Adapun perubahan lembaga yang terakhir, sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah memberi keleluasaan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan masyarakat daerah masing-masing. Dengan demikian diharapkan daerah dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparat, dsb. Penetapan organisasi perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah adalah merupakan upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom, sehingga daerah dapat lebih meningkatkan aspek pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan RI.

- c. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai

Salah satu yang turut memberikan kontribusi terhadap sulitnya dalam pembenahan berbagai permasalahan Informasi di Kota Bogor adalah belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung, baik yang berupa sarana dan prasarana operasional bagi petugas maupun yang seharusnya melekat sebagai fasilitas dalam jaringan dan pemenuhan akses informasi.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

- a. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan dampak terhadap mobilitas sosio ekonomi masyarakat.

Dengan adanya fungsi Kota Bogor sebagaimana telah diuraikan diatas telah memberikan konsekwensi tersendiri terhadap kebutuhan mobilitas sosio ekonomi dan informasi yang ditandai dengan munculnya berbagai aktivitas sarana dan prasarana untuk kepentingan perdagangan dan jasa yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan dan mobilitas penduduk.

- b. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap permasalahan Informasi Publik.
Tingginya tingkat pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang tidak disertai dengan penataan dan penyediaan sarana dan prasarana berupa peralatan lunak akan memberikan konsekuensi terhadap munculnya berbagai permasalahan informasi. Kondisi Kota Bogor seperti ini telah berlangsung cukup lama sehingga masyarakat juga menunggu hasil konkrit terhadap usaha-usaha dalam penataan dan pemecahan system informasi publik.
 - c. Dukungan dari instansi vertikal
Berbagai upaya dalam membenah dibidang komunikasi tidak akan memberikan percepatan yang berarti apabila tanpa adanya partisipasi aktif dalam masyarakat.
 - d. Globalisasi
Perubahan paradigma dibidang ekonomi ditandai dengan isu liberalisasi perdagangan dan investasi, cenderung berusaha menghilangkan berbagai restriksi, proteksi dan campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Berbagai kesepakatan perdagangan dan investasi antar negara seperti General Agreement on Trade in Service (GATS) dituangkan dalam forum international World Trade Organisation (WTO) dan kesepakatan-kesepakatan perdagangan dalam lingkup regional seperti Asian Pacific Economic Cooperation (APEC), Asean Free Trade Area (AFTA), North America Free Trade Agreement (NAFTA) dan Australia New Zealand Closer Relation Trade Agreement (ANZCERTA), serta bidang lingkungan hidup terkait adanya forum ICLEI kesemuanya ini bersifat mengikat bagi negara yang meratifikasi perjanjian tersebut termasuk Indonesia. Kondisi tersebut akan meningkatkan kebutuhan jasa Komunikasi. dan Kota Bogor sebagai penyangga Ibukota, sudah selayaknya untuk mempersiapkan diri dalam mendukung kebijakan tersebut termasuk kebutuhan jasa Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud.
 - e. Implementasi otonomi daerah
Sektor Komunikasi dan informasi dituntut untuk semakin mampu berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa yang pada akhirnya dapat berfungsi sebagai perekat dan jembatan guna mendukung tumbuhnya perekonomian wilayah serta sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah. Tuntutan untuk selalu memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, merupakan inti substansi dari pembangunan sektor yang berwawasan pembangunan wilayah. Konsep ini menjadi relevan dengan diimplementasikannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu kewenangan daerah dalam penyelenggaraan, pembiayaan dan perencanaan pembangunan semakin besar yang ditopang oleh pendapatan daerah dan dimungkinkannya adanya Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ditambah lagi dengan adanya PP Nomor 38 Tahun 2008 menunjukkan semakin jelasnya kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
3. **Analisis SWOT**
- Analisa SWOT merupakan *instrument* yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan isu-isu strategis didalam mengelola penyelenggaraan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Berikut ini adalah hasil identifikasi SWOT.

a. Kekuatan (Strenght)

1. Adanya dukungan Political Will dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta Pihak Legeslatif dalam pengembangan sistem Informasi.
2. Adanya Struktur Organisasi.
3. Adanya dukungan dana.
4. Adanya komitmen pimpinan untuk memperbaiki dan menyelaraskan berbagai ketentuan perundang-undangan yang relevan dan menerapkan secara konsekuen sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan.

b. Kelemahan (Weaknesse)

1. Kualitas dan kuantitas SDM di bidang Teknik Komputer dan Komunikasi belum memadai.
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
3. Tingkat kinerja kelembagaan yang masih lemah.
4. Tingkat akurasi data masih rendah.

c. Peluang (Opportunities)

1. Adanya dukungan partisipasi masyarakat dalam bidang Komunikasi dan Informasi.
2. Adanya otonomi daerah dan desentralisasi Bidang Komunikasi.
3. Adanya Program bantuan dana dari Propinsi.
4. Adanya program kerjasama tentang IT.

d. Ancaman (Threat)

1. Banyaknya informasi yang masuk ke Kota Bogor Karena arus Globalisasi.
2. Tingkat Pembangunan Infrastruktur, informasi dan Telekomunikasi yang pesat dan tidak terkendali.
3. Tingginya perkembangan Teknologi TI yang sulit untuk diikuti oleh regulasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2014, yakni; 1). Peningkatan daya saing masyarakat, pelayanan kesehatan, kemandirian dan pengokohan ketahanan keluarga, 2). Memperkuat pembangunan perekonomian perdesaan dan regional, peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, penguatan UMKM dan daya saing usaha, 3). Modernisasi pemerintahan dan peningkatan partisipasi publik, 4). Peningkatan kualitas infrastruktur strategis dan menciptakan Jawa Barat yang nyaman melalui pembangunan berkelanjutan, 5). Pengembangan seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal. Selain itu Provinsi Jawa Barat telah mencanangkan Cyber Province dan menjadikan Kota Bogor sebagai Cyber City, sehingga Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan pemerintahan dalam mencapai arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

b. Visi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kota Bogor

Komunikasi dan Informatika sebagai Media Peningkatan SDM dan Pelayanan Prima Sedangkan maksud dari visi tersebut antara lain Penerapan teknologi informasi di segala bidang menuntut aparat pemerintahan dan masyarakat untuk dapat menguasai dan mengaplikasikannya agar dengan mudah mengikuti perkembangan jaman serta memperoleh informasi dari berbagai sumber.

Visi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik “*Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas (Smart City) berbasis Teknologi Informasi dan Telekomunikasi*”.

c. Misi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kota Bogor

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada semua *stakeholder*.
- 2) Meningkatkan Kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi.
- 3) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance*.
- 4) Peningkatan mutu pelayanan publik
- 5) Mewujudkan lingkungan masyarakat bogor yang cerdas, dinamis dan kompetitif dalam persaingan lokal dan global
- 6) Mewujudkan jaringan komunikasi yang efektif dan efisien
- 7) Mengoptimalkan penggunaan web dan memanfaatkan email sebagai media dalam sistem informasi

Penerapan teknologi informasi dalam memperlancar pekerjaan perlu dibuat rancang bangun aplikasi e-government dan optimalisasi system informasi di kecamatan dan kelurahan. Pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat dengan pengelolaan jaringan dan akses internet yang dapat dengan mudah diketahui oleh warga masyarakat.

3.3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2017

A. Program Dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- a. Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika
 - 1) Pengadaan Bandwith Internet.
 - 2) Pemeliharaan dan Peningkatan jaringan intranet dan internet (backbone) Kota Bogor.
 - 3) Pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi.
 - 4) Pengembangan infrastruktur jaringan kota.
 - 5) Pemeliharaan grounding listrik + erester internet SKPD dan kelurahan
 - 6) Pembangunan dan Pengelolaan NOC

- b. Seksi Aplikasi dan PDE
 - 1) Pengadaan dan pemeliharaan perangkat Lab RICE Kota Bogor
 - 2) Pemeliharaan portal web dan co-location
 - 3) Pemeliharaan CCTV dan Peralatan Multimedia
 - 4) Pengembangan aplikasi e-gov
 - 5) Digitalisasi Profil Kota Bogor

- c. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik
 - 1) Penyelenggaraan Radio sipatahunan
 - 2) Pengawasan dan Pengendalian Menara
 - 3) Pengendalian peredaran Film, VCD dan DVD

2. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- a. Subbag Tata Usaha :
 - 1) Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan SKPD.

3. Program Administrasi PerDinasan

- a. Subbag Tata Usaha :
 - 1) Pengelolaan Rumah Tangga SKPD.

4. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

a. Subbag Tata Usaha :

- 1) Pemeliharaan rutin/ berkala inventaris Dinas.
- 2) Pengadaan Inventaris Dinas.

Untuk indikator dan target kinerja terdapat pada Tabel 3 berikut ini.

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja Kegiatan
1	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD (Honor pegawai non PNS, ATK, Barang cetakan, Alat listrik & elektronik, Peralatan kebersihan , Biaya telepon, Surat Kabar, Mamin, Perjadin, BBM, PDH) (Bulan)	12
	Persentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD	100%
	Honorarium Pegawai Non PNS (bagi OPD memiliki Pegawai Non PNS)	12 Bulan, 100%
	Belanja Alat Tulis Kerja	12 Bulan, 100%
	Belanja Cetakan/ Penggandaan	100%
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan, 100%
	Pembayaran Listrik	12 Bulan, 100%
	Belanja Kebersihan	12 Bulan, 100%
	Pembayaran Air/PDAM	12 Bulan, 100%
	Telepon/ Internet/ Speedy	12 Bulan, 100%
	Belanja Surat Kabar	12 Bulan, 100%
	Belanja Makan Minum Rapat	12 Bulan, 100%
	Belanja Pakaian Dinas (PDH,PDL dan PDUB) (sesuai TUPOKSI)	100%
	Belanja Makan dan Minum Rapat	12 Bulan, 100%
	Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan, 100%
	Belanja Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan, 100%
	Belanja Gas	12 Bulan, 100%
	Belanja Bahan Bakar Minyak	12 Bulan, 100%
	Pembayaran Asuransi BPJS Pegawai Non PNS (bagi OPD memiliki Pegawai Non PNS)	12 Bulan, 100%
	Belanja Alat Keselamatan Kerja/ SAR	100%
	Pembayaran PBB dan STNK	100%
	Biaya Pindah (OPD dengan TUPOKSI Pindah Pegawai)	100%
2	Penyusunan dokumen perencanaan (Renja OPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)	100%

	Persentase penyusunan dokumen perencanaan (Renja OPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)	100%
	1. Dokumen LAKIP Kota Bogor Tahun 2016	100%, 10 Dokumen
	2. Dokumen LKPJ WaliKota Bogor Tahun 2016	100%, 10 Dokumen
	3. Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2017	100%, 10 Dokumen
	4. Dokumen LPPD Tahun 2016	100%, 10 Dokumen
	5. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Bagi OPD Pelayanan Publik)	-
	6. Pameran hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sektoral (OPD peserta pameran pembangunan dalam MUSREMBANG Kota Bogor Tahun 2017)	1 Kali ikut serta dalam MUSREMBANG Tingkat Kota Bogor, 1 Stand Pameran
3	Pemenuhan kebutuhan inventaris Dinas (%)	100%
4	Inventaris Dinas yang terpelihara (%)	100%
	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dinas	100%
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Operasional OPD	100%
5	OPD yang menyediakan informasi publik sesuai Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (%)	40
6	Jumlah regulasi tentang implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Perwali)	5
	Raperda/Perwali	5 Perwali
	SK Tim	1 Dokumen
	SK Walikota tentang SOP Pengaduan masyarakat	1 Dokumen
	Peraturan Walikota tentang Keamanan Jaringan	1 Dokumen, 50 Eksemplar
	Naskah Kajian	1 Naskah, 100%
	Tersedianya BANDWIDTH internet untuk SKPD se-Kota Bogor (Mbps)	300 mbps
	Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (BACKBONE)	17 Titik
	Tersedianya Jaringan Fiber Optik di SKPD (Titik)	37 Titik
	Tersedianya Jaringan Telekomunikasi di SKPD (Titik)	45 Titik
	Terlaksananya kegiatan pengelolaan Bogor Green Room (Paket)	1 Paket
	Terlaksananya pengelolaan data center (Tier)	Tier 1
	Pembinaan Server OPD	100%

	Titik	1 Naskah, 100%
	Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi (Titik)	5 Titik (Taman Peranginan, Sempur, Taman Topi, Malabar dan Masjid Raya)
	SK Kepala Dinas Penetapan Titik WIFI	1 Dokumen
	Terpeliharanya Grounding Listrik dan Erester di OPD dan Kelurahan (Titik)	25 Titik
	terlaksananya pengembangan dan pengelolaan SIM	5 SIM (SIM Wilayah, SIM Puskesmas, SIM Surat, SIM Pembangunan, SIM Pengaduan dan SIM Eksotik)
	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan website Pemerintah Kota Bogor	2,5 Juta Kunjungan
	Persentase Integrasi SIM	20%
	(SIAK, SIM Puskesmas, SIM Wilayah, SIM Surat)	20%
	Mesin Anjungan	6 Anjungan
	Mesin Anjungan Kelurahan	34 Anjungan Kelurahan
	Terpeliharanya CCTV dan Multimedia (Titik)	98 Titik
	Terpeliharanya Perangkat Lab RICE (Paket)	1 Paket
	Terlaksananya siaran TV Publik	1 Paket Operasional TV Publik/TV Edukasi/ TV Pemkot
	Operasional Redaktur	100%
	Operasional Penyiar	100%
	Operasional Peliput	100%
	Operasional Operator	100%
	Tersedianya papan informasi elektronik	4 Unit
	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi menara telekomunikasi	251 Menara
	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pembinaan peredaran film, VCD dan DVD	10 Lokasi
	Tersedianya jaringan serat optik bawah tanah bersama	7 Km
	Pembinaan radio komunitas (kali)	1
	Terlaksananya siaran radio Sipatahunan	6.588 jam siaran
	Terpeliharanya peralatan Radio Sipatahunan	1 Paket
	Terlaksananya kegiatan pembinaan Radio Komunitas	1 Radio
	Jumlah SDM dilatih TIK (orang)	100

	Jumlah jabatan fungsional SDM TIK	2
	Terlaksananya kegiatan pelatihan SDM TIK	280 Orang
	Pelatihan Operator Control Room untuk SMART CITY	140 Orang
	Pelatihan Operator SIM Pengaduan	140 Orang
	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Operator	100%

BAB IV PENUTUP

Mewujudkan kinerja Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik seperti terurai pada program ini bukan hal yang mudah, namun bukan sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Seperti halnya dalam mewujudkan karya besar lain, upaya merealisasikan program ini dalam aktivitas nyata diperlukan dedikasi yang kuat dengan dukungan keyakinan bahwa sebagian besar cita-cita dapat diwujudkan. Jika ada keterbatasan dalam melaksanakannya, maka upayakan pelabaran peluang itu dikembangkan lewat pengembangan paham, ilmu dan keterampilan yang dibangun bersama.

Dalam mewujudkan harapan yang terurai dalam program akan dilaksanakan beberapa strategi yang dijelaskan dalam bagian awal program ini dengan mengacu pada strategi dasar seperti yang dijelaskan dalam bagian awal program ini dengan mangacu pada :

- i.Strategi ini dengan memperjelas visi, misi dan tujuan bekerja untuk seluruh personal Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Pemerintah Kota Bogor. Membatasi secara bertahap fungsi-fungsi yang tidak sejalan dengan visi dan arah pengembangan jangka menengah dan jangka panjang.
- ii.Memperbaiki tujuan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan produk yang adaptif sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, belajar dari pengalaman.
- iii.Mengembangkan pendekatan konsekuensi melalui pembinaan organisasi sebagai pemberi pelayanan dengan tujuan akhir memperoleh keuntungan komperatif, memperluas koordinasi dan kerja sama untuk menciptakan lebih banyak produk yang dibutuhkan publik.
- iv.Mengembangkan daya komperatif secara berkelanjutan melalui **Benchmarking Kompetitif** untuk mengukur dan membandingkan kinerja organisasi dengan harapan dapat menciptakan kompetisi psikologi, menjunjung harga diri dan dorongan untuk menjadi yang lebih baik.
- v.Berikutnya berorintasi pada pengembangan pelanggan, terdapat penciptaan pelanggan untuk mengembangkan sumber daya yang memadai untuk menciptakan permintaan penggunaan, menumbuhkan keperluan informasi yang bisa diakses. Sebagai konsekuensi dari itu, maka pilihan kompetitif adalah memastikan mutu penyajian informasi melalui web dan mutu jaringan harus dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan sebagai persyaratan terwujudnya visi.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan dapat sebagai “CHOKPIT” atau Control Panel dan acuan yang menggambarkan kinerja secara tertulis walaupun masih terdapat kegiatan-kegiatan lapangan dan pelayanan yang tidak dapat digambarkan dalam laporan ini secara rinci.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan Kinerja Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Kota Bogor pada masa yang akan datang maupun instansi lain yang mempunyai relevansi terhadap bidang Komunikasi dan informatika.

Bogor 2016
Kepala
Kantor Komunikasi dan Informatika
Kota Bogor

Asep Zaenal Rahmat,S.Pd
NIP. 19650804 198812 1 003

NO	URAIAN	ANGGARAN THN 2017 (Rp)
1	2	3
1	Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga OPD	500,000,000
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	50,000,000
1	Kegiatan pemeliharaan Inventaris Dinas	509,584,221
2	Kegiatan Pengadaan Inventaris Dinas	500,000,000
1	Kegiatan Sosialisasi TIK	250,000,000
2	Kegiatan Penyusunan Kajian Kelembagaan KOMINFO	50,000,000
1	Kegiatan Digitalisasi Profil.	780,000,000
2	Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan Multimedia RR I, II, III	100,000,000
3	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor	150,000,000
4	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e-Govt	1,125,000,000
5	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room	3,000,000,000
6	Kegiatan Pengembangan dan Pembuatan repository / data Warehouse	300,000,000
1	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Radio Sipatahunan.	700,000,000
2	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Film, VCD dan DVD Ilegal	100,000,000
3	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara.	250,000,000
4	Kegiatan Pembuatan papan Informasi Elektronik	2,700,000,000
5	Kegiatan Penyelenggaraan SP TV	500,000,000
1	Kegiatan Pembinaan Radio Komunitas	50,000,000
1	Kegiatan Pembangunan Wifi Ruang Publik	100,000,000
2	Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota.	2,500,000,000
3	Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi	500,000,000
4	Kegiatan Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor	1,000,000,000
5	Kegiatan Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan	200,000,000
6	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Center	1,000,000,000
7	Kegiatan Pengadaan BANDWIDTH.	3,000,000,000
	JUMLAH TOTAL	19,914,584,221